

## 31 Rumah di Sukabumi Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

**SUKABUMI (IM)**- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi mencatat rumah rusak akibat angin puting beliung yang melanda dua kelurahan di Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (27/1), mencapai 31 unit. "Puluhan rumah yang rusak tersebut tersebar di dua kelurahan, yakni Kelurahan Cibereum-hilir dan Limusnunggal," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Novian Rahmat di Sukabumi, Minggu (28/1).

Adapun rincian kerusakan rumah terdampak bencana angin puting beliung, di Kelurahan Cibereum-hilir di RT 01, RW 02 sebanyak 12 unit rusak ringan. Di RT 02, RW 02 sebanyak delapan unit rusak ringan.

Kemudian untuk di Kelurahan Limusnunggal tepatnya di RT 01, RW 05 sebanyak 10 unit rusak ringan dan satu unit rusak berat pada bagian atap. Selain rumah, pondok pesantren yang berada di RT 01, RW 02, Kelurahan Cibereum-hilir mengalami rusak ringan.

Menurut Novian, tidak ada korban jiwa maupun luka pada kejadian bencana yang terjadi

pada Sabtu sekitar pukul 15.30 WIB. Hanya saja satu kepala keluarga (KK) atau lima jiwa yang tinggal di RT 01, RW 02 Kelurahan Cibereum-hilir harus mengungsi karena rumahnya rusak berat.

"Hingga saat ini puluhan petugas gabungan dari berbagai instansi maupun komunitas masih berada di lokasi kejadian untuk membantu penyaluran bantuan bencana angin puting beliung membersihkan puing dan memperbaiki rumah yang rusak," ucapnya.

Novian mengatakan kerugian yang diderita penyaluran masih dalam pendataan.

Sementara untuk petugas yang terlibat operasi penanggulangan bencana angin puting beliung sebanyak 21 orang yang berasal dari BPBD Kota Sukabumi, Pemerintah Kelurahan Cibereum-hilir dan Limusnunggal, Koramil Cibereum, Polres Sukabumi Kota, 6 Kodim 0607 Kota Sukabumi, Polsek Cibereum serta sejumlah komunitas yang juga dibantu warga sekitar. ● **pra**

## Bantuan Pangan 2024 Mulai Disalurkan di 92 Desa Sekitar Purwakarta

**PURWAKARTA (IM)**- Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mulai menyalurkan bantuan pangan untuk puluhan ribu keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 92 desa sekitar Purwakarta.

"Bantuan pangan yang disalurkan ini berupa beras, dengan sasaran sebanyak 87.225 keluarga penerima manfaat," kata Penjabat Bupati Purwakarta, Benni Irwan di Purwakarta, Minggu (28/1).

Ia menjelaskan, penyaluran cadangan beras pemerintah untuk puluhan ribu keluarga itu merupakan bantuan pangan tahap pertama pada tahun 2024. Setiap keluarga penerima manfaat menerima satu paket bantuan pangan pemerintah berupa 10 kilogram beras.

Dia menyebutkan bahwa penyaluran bantuan pangan tahap pertama pada tahun 2024 ini mulai diluncurkan pada Sabtu (27/1), dengan menghadirkan sekitar seribu keluarga penerima manfaat.

Benni menyampaikan, penyaluran bantuan pangan tahap pertama dengan sasaran puluhan ribu keluarga pener-

ima manfaat tersebut akan berlangsung selama Januari hingga Maret 2024. "Untuk penyaluran atau pendistribusian dilakukan langsung oleh Kantor Pos," katanya.

Menurut dia, penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah pusat yang telah dilaksanakan sejak tahun lalu, dan kini program tersebut dilanjutkan.

"Dalam kurun waktu tujuh bulan di tahun 2023, Pemkab Purwakarta sudah melakukan tiga tahap bantuan pangan kepada 87.225 keluarga penerima manfaat," kata Benni.

Guna melancarkan realisasi bantuan pangan lanjutan pada tahun ini, Pemkab Purwakarta telah mengkoordinasikan program bantuan pangan ini kepada seluruh camat, lurah, dan kepala desa.

"Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pembagian beras ini berjalan lancar. Jadi jika ada hal-hal teknis atau dinamika di lapangan bisa dikoordinasikan dengan pemerintahan daerah, bisa ke kantor pos atau juga bisa ke pemda," katanya. ● **pra**

## Pj. Bupati Bogor Ingin Ciptakan Iklim Bisnis yang Aman dan Kondusif



Pj. Bupati Bogor akan memperkuat sinergi bersama APINDO, guna menciptakan iklim usaha yang aman dan kondusif.

**BOGOR (IM)**- Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu perkuat sinergi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) guna menciptakan iklim bisnis yang aman dan kondusif, yang berlangsung di Hotel Ciputra Cibubur, Jakarta, Sabtu (27/1).

Asmawa Tosepu mengungkapkan, akan membangun sinergi, kolaborasi dan silaturahmi dengan APINDO itu penting untuk menjaga usaha yang kondusif, kompetitif khususnya di Kabupaten Bogor.

"Kami Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memberikan apresiasi dan dukungan, semangat gotong royong sinergi dan kolaborasi antar-pemda dengan sektor swasta dan seluruh stakeholder. Insya Allah kita akan membangun komunitas masyarakat yang kuat dan sejahtera dan berdaya saing," ujar Pj. Bupati Bogor.

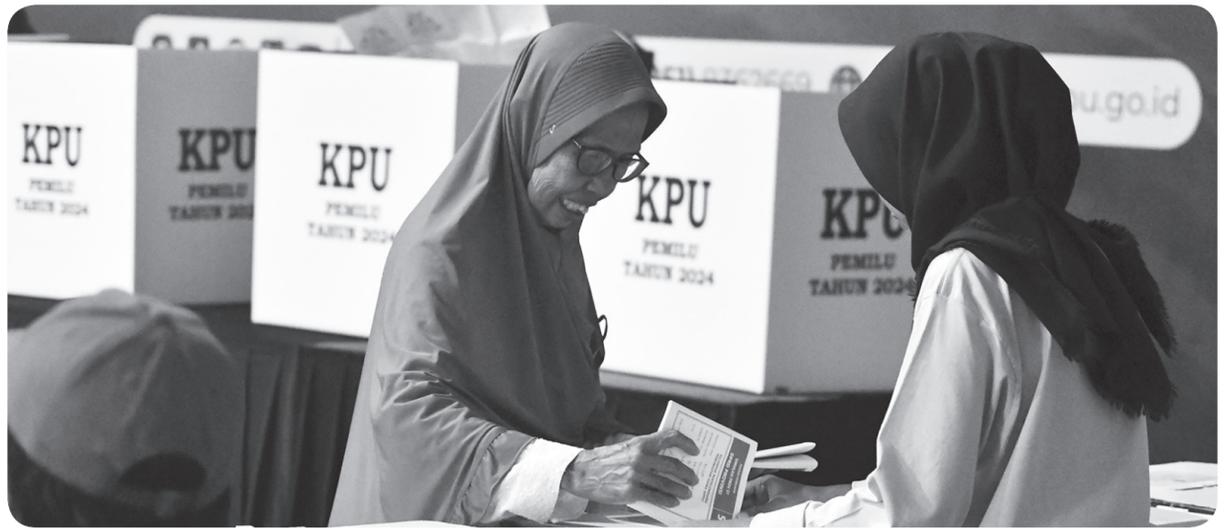
Selanjutnya, Ketua DPK APINDO Kabupaten Bogor, Supari Ab-

dul Hayi menyampaikan, terimakasih dan apresiasi atas kehadiran Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu beserta jajaran Pemkab Bogor pada kegiatan ini. Sehingga dapat meningkatkan komitmen dan motivasi jajaran APINDO dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan para pekerja juga pengusaha di Kabupaten Bogor.

"Mudah-mudahan dengan kegiatan ini tali silaturahmi bisa lebih kuat, bisa saling jaga dan kerjasama satu sama lain, sehingga tujuan kita untuk menciptakan masyarakat damai bisa tercapai. Mari kita jaga kondusif sukses dan damai perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor," imbuhnya.

Turut hadir mendampingi Pj. Bupati Bogor yakni, Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asekbang) Kabupaten Bogor, Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Ketua Dirut Bank BJB dan ketua BPJS cabang Cibinong. ● **gio**

# 8 | Nusantara



## SIMULASI PEMUNGUTAN SUARA PEMILU 2024 DI BOGOR

Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat simulasi pemungutan suara Pemilu 2024 di halaman Instansi Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Bogor, Jabar, Minggu (28/1). KPU Kota Bogor menggelar simulasi pemungutan suara Pemilu 2024 yang diikuti sebanyak 241 warga dari Kel.Pasir Jaya, Bogor yang tergabung dalam pemilih di TPS 49.

UNTUK PERCEPAT PEMBANGUNAN

## Bupati Bogor Butuh Kerjasama dengan 9 Anggota DPR

Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu menyebutkan 9 Anggota DPR ini tidak pernah duduk bareng dengan Bupati Bogor, DPRD Kabupaten Bogor maupun DPRD Jawa Barat untuk menyelesaikan permasalahan besar di Kabupaten Bogor.

**CIBINONG (IM)**- Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengatakan pihaknya membutuhkan 9 Anggota DPR untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Bogor. Terutama, kebijakan yang kewenangannya ada di

pemerintah pusat. Walaupun belum bisa duduk bersama dengan 9 Anggota DPR tersebut, namun Asmawa Tosepu mengaku sudah berkoordinasi secara kelembagaan. Dia mengaku harus menyesuaikan dengan Kom-

isi-Komisi DPR untuk mengatasi permasalahan di Kabupaten Bogor.

"Pemkab Bogor membutuhkan 9 Anggota DPR untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Bogor. Dan saya bukanlah raja kecil," kata Asmawa Tosepu kepada wartawan, Jumat lalu.

Pria asli Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara ini mengaku sudah mengusulkan ke Komisi V DPR untuk pembangunan Fly Over Jalan Raya Bojonggede-Kemang (Bomang).

"Kami sudah mengusulkan, dengan skema program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah ke Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr), dan kami menunggu Kemenpupr membiayai pembangunan Fly Over Jalan Raya Bomang," tutur Asmawa Tosepu.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu menyebutkan 9 Anggota DPR ini tidak pernah duduk bareng dengan Bupati Bogor, DPRD Kabupaten Bogor maupun DPRD Jawa Barat untuk menyelesaikan permasalahan besar di Kabupaten Bogor.

Padahal, menurut politisi PDIP tersebut, 9 Anggota DPR dengan DPRD Kabupaten Bogor dan DPRD Jawa Barat adalah

kekuatan besar, untuk mengatasi permasalahan besar atau rumit untuk diselesaikan.

"Bisa tidak 9 Anggota DPR dari Dapil Kabupaten Bogor duduk bareng dan rutin per tiga bulan bersama Bupati Bogor, DPRD Kabupaten Bogor maupun DPRD Jawa Barat lalu menyelesaikan berbagai masalah seperti jalan khusus tambang?" kata Adian Napitupulu.

Adian Napitupulu menuturkan, dengan kekuatan politik para anggota legislatif ia yakin bisa mempercepat solusi permasalahan jalan khusus tambang dan turunannya. ● **gio**

## Pj. Bupati Bogor: Kehadiran Hotel Harris dan Cibinong City Mall 2 Berdampak Positif

**BOGOR (IM)**- Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu meresmikan Hotel & Convention Harris Cibinong dan Cibinong City Mall 2, Sabtu (27/1).

Pada kesempatan tersebut ia mengatakan insya Allah kehadiran keduanya akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tentu saja membuka lapangan pekerjaan, khususnya bagi masyarakat sekitar.

Asmawa Tosepu mengungkapkan, atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor dirinya mengucapkan selamat dan sukses kepada segenap pimpinan beserta jajaran Harris Hotels dan Cibinong City Mall. Serta turut bergembira akan kehadiran Hotel & Convention Harris Cibinong dan Cibinong

City Mall 2.

Ia menjelaskan, Kabupaten Bogor dengan tagline Sport and Tourism, kaya akan potensi wisata dan memiliki banyak destinasi wisata sehingga selalu ramai dikunjungi wisatawan baik itu regional, nasional hingga internasional. Selain itu, letak Kabupaten Bogor sangat strategis, dekat metropolitan Jakarta dan sebagai bagian kawasan industri Jabodetabek.

"Hotel bukan hanya untuk wisatawan tapi juga akomodasi berbagai kegiatan instansi pemerintah maupun swasta, baik itu rapat, bimbingan teknis, sosialisasi, diklat, gathering, dan menjadi tuan rumah berbagai acara penting yang berskala internasional," tandas Asmawa.

Ia menambahkan, Pemkab Bogor juga terus

berupaya memperkuat sinergi dan kolaborasi segenap ekosistem pariwisata agar pariwisata, ekowisata, seni budaya, bisnis, olahraga, UMKM dan ekraf dapat sama-sama maju dan berkembang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Saya harap Hotel Harris dan Cibinong City Mall 2 dapat terus memberikan pelayanannya yang terbaik sehingga turut menjadi menjadi katalisator bagi kemajuan pariwisata di Kabupaten Bogor," ujar Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu.

Hadir pada kegiatan tersebut, perwakilan Forkopimda Kabupaten Bogor, jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, beserta jajaran Harris Hotels dan Cibinong City Mall. ● **gio**

## Bupati Bandung Dukung Upaya Uji Materi UU Pilkada ke MK

**BANDUNG (IM)**- Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyambut baik langkah 11 kepala daerah yang mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan Pasal 201 Ayat 7, 8, dan 9 Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Bupati yang akrab disapa Kang DS itu mengatakan, materi judicial review yang diajukan berhubungan dengan desain Pilkada Serentak 2024. Kang DS mengatakan, ketiga pasal pada beleid itu dianggap bermasalah dan melanggar konstitusi karena merugikan 270 kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang masa jabatannya terpankas secara signifikan.

"Desain keserentakan Pilkada 2024 yang paling disoroti adalah terpankasnya masa jabatan kepala daerah secara signifikan. Padahal, menurut UU, masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun," ujar Kang DS dalam rilis yang diterima Minggu (28/1).

Secara persentase, katanya, jumlah kepala daerah yang dirugikan akibat Pilkada 2024 yang dilaksanakan secara serentak mencapai sekitar 270 kepala daerah atau 49,5 persen dari total 546 kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kang DS menambahkan, jika Pilkada 2024 digelar secara serentak satu gelombang pada November 2024, sebanyak 270 kepala daerah di Indonesia akan terpankas masa jabatannya sekitar 1,5 tahun. Sebab, mereka baru dilantik menjadi kepala daerah pada awal atau pertengahan 2021.

"Contohnya, saya. Jika Pilkada dilakukan pada 2024, masa jabatan saya hanya 3,5 tahun bukan lima tahun. Artinya 1,5

tahun masa jabatan saya terpankas karena aturan Pilkada serentak tersebut. (Untuk itu,) saya setuju dan mendukung penuh upaya judicial review tersebut," tuturnya.

Adapun 11 kepala daerah yang bertindak sebagai pemohon pada judicial review itu adalah Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Barat, Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Bupati Malaka, Bupati Kebumen, Bupati Malang, Bupati Nunukan, Bupati Rokan Hulu, Wali Kota Makassar, Wali Kota Bontang, serta Wali Kota Bukittinggi.

"(Sebanyak) 11 kepala daerah yang jadi pemohon tersebut mewakili kepentingan 270 kepala daerah yang terdampak. Sekali lagi saya sangat mendukung dan menyambut baik upaya judicial review itu," ujar Kang DS.

Sebagai solusi, Kang DS mengatakan, para pemohon meminta MK untuk membatalkan pelaksanaan Pilkada 2024 menjadi dua gelombang pada 546 daerah otonomi. Pilkada gelombang pertama dilaksanakan di 276 daerah pada November 2024. Sementara itu, gelombang kedua dilaksanakan di 270 daerah pada Desember 2025, termasuk Kabupaten Bandung.

"Saya kira, desain dua gelombang ini menjadi solusi atau jalan tengah, mulai dari permasalahan teknis pelaksanaan Pilkada satu gelombang, persoalan keamanan, hingga persoalan pemotongan masa jabatan sebanyak 270 kepala daerah sebagai konsekuensi keberadaan pasal-pasal tersebut," tutur Kang DS.

Dengan demikian, imbuhnya, sebanyak 270 kepala daerah yang melaksanakan Pilkada pada gelombang kedua tetap menjabat sebagai kepala daerah selama lima tahun sesuai amanat konstitusi. ● **pra**



Pj Bupati menyebut, kehadiran Hotel Harris dan Cibinong City Mall 2, memberikan dampak positif bagi Kabupaten Bogor.